

**KAJIAN PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN
UMKM KULINER DI KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI
BARAT**
(Studi Kasus Usaha Mikro Kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana)

Rahmat¹, Sitti Rahbiah², Muhammad Salim²

¹Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia

²Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia

081344419213, rahmataqma02@gmail.com

ABSTRACT

Research aims to identify government programs for development of culinary MSMEs (2018-2019), analyze the role of the government in the development of culinary MSMEs, analyze the development of MSMEs and analyze the barriers to developing culinary MSME. The research was conducted in Mosso Village, Sendana District, Majene Regency, West Sulawesi Province, for 3 (three) months. The population, namely agencies related to the development of culinary MSMEs, namely the Regent, Cooperative MSMEs and Trade Office (Diskoperindag), Head of District, Village Head, culinary MSME actors as many as 69 people, the sample is the Head of Diskoperindag, Majene, Field Staff for Cooperatives and MSMEs Majene, The staff of Sendana Subdistrict for MSME Development, Head of Mosso Village and respondents are culinary MSME players in Mosso Village. The results research are government programs in development of culinary micro businesses, there are four fields, namely in the field of production and processing, marketing, human resources and technology design. The level of the role of the Government (Diskoperindag) as facilitator, regulator, catalyst is classified as moderate. The development of the culinary micro business, there are four fields, namely business capital, sales turnover and business profits, labor, and MSME business branches. Barriers to developing a culinary micro business, namely lack of communication, passive behavior, lack of understanding of information, lack of government policies and lack of understanding of Business to Government.

Keywords: culinary, MSME development, the role of government

INTISARI

Penelitian bertujuan mengidentifikasi program pemerintah untuk pengembangan UMKM Kuliner (2018-2019), menganalisis peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM kuliner, menganalisis perkembangan UMKM, menganalisis hambatan pengembangan UMKM Kuliner. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selama 3 (tiga) bulan. Adapun populasi yaitu instansi berkaitan pengembangan UMKM kuliner yaitu Bupati, Diskoperindag (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan), Camat, Lurah, pelaku UMKM kuliner sebanyak 69 orang, sampel yaitu Kepala Diskoperindag Majene, Staf Lapangan Bidang Koperasi dan UMKM Majene, Staf Kecamatan Sendana Bidang Pembinaan UMKM, Kepala Kelurahan Mosso dan responden adalah pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Mosso. Hasil penelitian yaitu program pemerintah dalam pengembangan usaha mikro

kuliner, ada empat bidang yaitu dalam bidang produksi dan pengolahan, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia dan bidang desain teknologi. Tingkat peran Pemerintah (Diskoperindag) sebagai fasilitator, regulator, katalisator tergolong sedang. Perkembangan usaha mikro kuliner, ada empat bidang yaitu modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha, tenaga kerja, dan cabang usaha UMKM. Hambatan pengembangan usaha mikro kuliner yaitu kurangnya komunikasi, perilaku pasif, minimnya pemahaman informasi, kebijakan pemerintah kurang dan tidak pahamnya Business to Government.

Kata kunci: kuliner, pengembangan UMKM, peran pemerintah

PENDAHULUAN

Kata Kuliner berasal dari bahasa Inggris “culinary” diartikan sebagai yang berhubungan dengan dapur atau masakan (Chol, J & Shadily, H 2000). Masakan tersebut dapat berupa lauk-pauk, makanan (pangan) dan minuman. Klasifikasi makanan menurut penyajiannya antara lain, saji di tempat dan saji tidak di tempat, sedangkan menurut daya tahan dibedakan menjadi kurang dari sehari dan lebih dari sehari. Menurut cara penyajiannya, klasifikasi makanan dibedakan menjadi penyajian formal dan non formal yaitu sambil menikmati pertunjukan seni dan keindahan alam. Pada awalnya makanan hanya menjadi salah satu pelengkap kegiatan wisata, namun kemudian berkembang menjadi salah satu bentuk wisata khusus yang disebut dengan istilah wisata makanan atau food tourism. Salah satu bentuk food tourism adalah wisata kuliner. Pengertian kuliner secara umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa masakan berupa lauk-pauk, pangan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari (KBBI, 1994). Keberadaan pengusaha kuliner baik mikro dan menengah sangatlah besar. Hal tersebut bisa dilihat dari data olahan Koperasi dan UMKM RI yang berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2011, terdapat 101.722.458 milyar jumlah tenaga yang diserap. Untuk tahun 2012, penyerapan tenaga kerja juga naik sebesar 5.935.051 milyar tenaga kerja menjadi 107.657.509 jumlah tenaga kerja. Hal itu didukung oleh salah satu penelitian yang mengatakan “berdasarkan pernyataan IPWBT, Wisata Belanja Tugu Kota Malang adalah suatu objek wisata yang mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 120.000.000” (Reni, M. 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi dengan dasar pertimbangan bahwa daerah ini

merupakan salah satu di Kabupaten Majene yang terbanyak jumlah UMKM dan merupakan wisata kuliner yang ada di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan data yang dilakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM kuliner yaitu Bupati, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Camat, Lurah/Desa dan seluruh pelaku UMKM kuliner sebanyak 69 orang yang ada di Kelurahan Mosso. Adapun informan dan responden dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Majene, Staf Lapangan Bidang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Majene, Staf Kecamatan Sendana Bidang Pembinaan UMKM, Kepala Kelurahan Mosso dan Responden adalah pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Mosso.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, peneliti menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui program apa saja dari pemerintah untuk pengembangan UMKM kuliner tahun 2018-2019. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua menganalisis peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM kuliner, dianalisis secara kualitatif. Dari jawaban responden atau informan pada kuisioner diperoleh data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode skoring (skor). Dari kriteria untuk setiap tanggapan masing-masing kategori adalah 3 = tinggi, 2 = sedang, dan 1 = rendah. Jawaban responden dihitung kemudian dikelompokkan sesuai kriteria. Dari kriteria yang didapatkan bobot nilai yang mengindikasikan tingkat peranan pemerintah. Masing-masing kriteria memiliki rentang sebagai pembatas dengan kriteria lain.

Tabel 1. Indikator Peranan Pemerintah Sebagai fasilitator, Regulator dan Katalisator (Diva, G. 2009).

No.	Peranan Pemerintah	Indikator	Skor				
1	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendanaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan bantuan dana dengan waktu pengcairan < 1 bulan - Pengajuan bantuan dana dengan waktu pengcairan 1-2 bulan - Pengajuan bantuan dana dengan waktu pengcairan > 2 bulan • Fasilitas pengembangan sumberdaya manusia <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pelatihan/Workshop 3 kali dalam satu tahun - Pengadaan Pelatihan/Workshop 2 kali dalam satu tahun - Pengadaan Pelatihan/Workshop 1 kali dalam satu tahun • Fasilitas pengembangan pasar <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan lokasi khusus usaha - Pembuatan tempat usaha - Penataan tempat usaha 	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>				
		2	Regulator	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan pembentukan usaha berakta notaris <ul style="list-style-type: none"> - Pembimbingan pengurusan akta notaris - Adanya pelatihan pengurusan akta notaris - Adanya arahan berkala pengurusan akta notaris • Arahan dan penyediaan gratis untuk memenuhi legalitas produk dan jasa yang ditawarkan <ul style="list-style-type: none"> - Adanya arahan pengarahannya bagi pelaku usaha untuk memenuhi legalitas atas produk yang ditawarkan Nomor PIRT, Halal Label, dan HAKI - Adanya arahan pengarahannya bagi pelaku usaha untuk memenuhi legalitas atas produk yang ditawarkan Nomor PIRT dan Halal Label - Adanya arahan pengarahannya bagi pelaku usaha untuk memenuhi legalitas atas produk yang ditawarkan Nomor PIRT 	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>		
				3	Katalisator	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan penciptaan wirausaha baru <ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun - Dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun - Dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun • Seminar kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun - Dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun - Dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun • Kerja sama dengan komunitas wirausaha <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi dalam mempertemukan berbagai komunitas wirausaha - Adanya pelatihan/Workshop - Adanya arahan kerja sama antar komunitas 	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>

$$\text{Rumus rentang} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Banyak Skor}}$$

Skor Tertinggi = 24

Skor Terendah = 8

Maka, Rentang = 5,3

Tabel 2. Tingkat Peran Pemerintah

No.	Interval Kelas	Tingkat Peran Pemerintah
1	8 – 13,3	Tinggi
2	13,4 – 18,7	Sedang
3	18,8 – 24	Rendah

Menjawab tujuan penelitian yang ketiga, peneliti menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisis hambatan dalam pengembangan UMKM kuliner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Identitas responden merupakan bagian yang menggambarkan bagian dari responden yang diwawancarai baik pelaku usaha mikro maupun lembaga yang meliputi umur, jenis usaha, tingkat pendidikan, lamanya usaha dan pengalaman berusaha.

Umur Responden

Umur responden merupakan ciri kedewasaan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang digeluti pelaku usaha. Selain itu umur juga salah faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dalam berkerja dan berpikir. Responden yang berumur muda mempunyai kemampuan fisik yang lebih besar dan inovatif dibandingkan dengan umur yang lebih tua (Roestam, A. W. 2003). Adapun umur responden pelaku usaha dan informan yaitu pada Tabel berikut:

Tabel 3. Identitas Pelaku Usaha Berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2019.

No.	Umur (Thn)	∑ Responden (orang)	Persentase (%)
1	30-37	5	25
2	38-45	12	60
3	46-51	3	15
Total		20	100
Minimum		30	
Maksimum		51	
Rata-Rata		40,85	

Sumber: *Data Primer Setelah Diolah 2019*

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa, umur minimum responden adalah 30 tahun, umur maksimum responden 51 tahun dan rata-rata umur responden adalah 40,85 tahun. Jumlah responden yang berada pada umur 30-37 tahun sebanyak 5 orang dan pada

kategori umur seperti ini dianggap sangat produktif karena masih sangat muda dan memiliki tenaga yang lebih besar. Jumlah responden yang berada pada umur 38-45 tahun sebanyak 12 orang dan pada kategori umur ini dianggap produktif. Jumlah responden yang berada pada umur 46-51 tahun sebanyak 3 orang dan pada kategori umur seperti ini masih dikategorikan umur produktif dalam bekerja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran faktor umur memberikan respon terhadap situasi yang potensial menimbulkan stress. Tenaga kerja yang usianya sudah lanjut (> 60 tahun) kemampuan dalam beradaptasinya menurun karena adanya penurunan fungsi organ di dalam tubuhnya (Roestam, A. W. 2003).

Pengalaman Berusaha

Setiap responden memiliki jumlah waktu pengalaman bekerja sebagai usaha dibidang kuliner, lama tidaknya responden menggeluti pekerjaannya tentu akan sangat mempengaruhi pengalaman yang telah dilalui. Semakin lama pengalaman responden dalam berusaha kuliner akan semakin banyak pelajaran yang telah didapatkan, misalkan pelaku usaha akan lebih paham teknik menarik konsumen. Berikut data yang menunjukkan lama responden berusaha kuliner. Identitas pengusaha berdasarkan pengalaman berusaha kuliner dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Identitas Pelaku Usaha Berdasarkan Pengalaman Berusaha di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2019.

No.	Umur (Thn)	Σ Responden (orang)	Persentase (%)
1	3,5-6,33	8	40
2	6,34-9,17	6	30
3	9,18-12	6	30
Total		20	100
Minimum		3,5	
Maksimum		12	
Rata-Rata		7,05	

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa, pengalaman berusaha kuliner minimum 3,5 tahun dan maksimum 12 tahun sedangkan rata-rata pengalaman berusaha kuliner yaitu 7,05 tahun. Adapun pengalaman berusaha kuliner 3,5-6,33 tahun sebanyak 8 orang, 6,34-9,17 tahun sebanyak 6 orang dan 9,18-12 sebanyak 6 orang. Berdasarkan Tabel di atas rata-rata pengalaman pengusaha kuliner masih sangat sedikit. Meski demikian, proses usaha penjualan tetap berjalan. Sesuai dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, A. 2004).

Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi cara berfikir pengusaha, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi cepat menerima inovasi dibandingkan yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah. Berikut mengenai identitas responden pengusaha kuliner di Kelurahan Mosso. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Identitas Pelaku Usaha Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2019.

No.	Umur (Thn)	Σ Responden (orang)	Persentase (%)
1	SD	6	30
2	SMP	8	40
3	SMA/SMK	6	30
Total		20	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 5, pengusaha kuliner yang memiliki pendidikan sebatas SD sebanyak 6 orang dengan persentase 30%, SMP sebanyak 8 orang dengan persentase 40% dan SMA/SMK sebanyak 6 orang dengan persentase 30%. Dengan melihat data di atas pendidikan SMP dan SMA/SMK terbanyak dicapai responden. Hal ini berarti tingkat pendidikan responden masih tergolong rendah. Produktivitas kerja yang diukur berdasarkan efisiensi penggunaan waktu kerja dan efektivitas output dipengaruhi secara signifikan oleh Tingkat Pendidikan. Produktivitas sangat terkait dengan input dan outputnya (Muchdarsyah, S. 2003).

Jumlah Tanggungan Keluarga Respoden

Tanggungun keluarga akan mempengaruhi seberapa banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh responden dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya, semakin banyak tanggungan keluarga maka akan semakin banyak biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga penjualan harus segera terlaksana agar dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga dan beberapa hal lainnya yang dianggap penting oleh pengusaha kuliner seperti pendidikan anak dan biaya kesehatan. Berikut data mengenai indentitas responden pengusaha kuliner di Kelurahan Mosso, berdasarkan jumlah tanggungan.

Identitas pelaku usaha berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Identitas Pelaku Usaha Berdasarkan Tanggungan Keluarga di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2019.

No.	Umur (Thn)	Σ Responden (orang)	Persentase (%)
1	1-2,67	9	45
2	2,68-4,35	8	40
3	4,36-6	3	15
Total		20	100
Minimum		1	
Maksimum		6	
Rata-Rata		2,85	

Sumber: *Data Primer Setelah Diolah, 2019.*

Berdasarkan Tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa, pelaku usaha kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki tanggungan keluarga 1-2,67 sebanyak 9 orang dengan persentase 45%, 2,68-4,35 sebanyak 8 orang dengan persentase 40% dan 4,36-6 sebanyak 3 orang dengan persentase 15%. Keluarga yang memiliki tanggungan keluarga minimum adalah 1 orang dan maksimum 6 orang, sedangkan rata-rata responden pelaku usaha kuliner memiliki tanggungan keluarga sebanyak 2,85. Dengan tanggungan keluarga seperti ini dianggap program pemerintah melalui BKKBN berhasil dalam menjalankan programnya.

Identifikasi Program Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Kuliner

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar No. 20 tahun 2008, pada Bab. IV tentang pengembangan usaha bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain teknologi. Dari hasil pengembangan ini merupakan implementasi program pemerintah di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat 2018/2019, yaitu sebagai berikut:

Program Pemerintah dalam Bidang Produksi dan Pengolahan

Pemanfaatan permodalan yang disediakan pemerintah. Disini peran pemerintah mengenai permodalan adalah sebagai berikut:

- a). Dengan membuka akses sebanyak-banyaknya dan melalui komunikasi yang baik dengan mitra binaan bank dan lain-lain
- b). Adanya pelatihan pengolahan
- c). Adanya pendampingan

Program Pemerintah dalam Bidang Pemasaran

Program pemasaran sangat membantu pengusaha mikro kuliner dalam mempromosikan dan memasarkan produknya. Adapun programnya yaitu:

- a). Melibatkan pengusaha kuliner dalam sebuah ivent seperti pameran
- b). Adanya brosur atau katalog yang disebarakan diberbagai media

- c). Adanya pengenalan beberapa produk oleh Diskoperindag

Program Pemerintah dalam Bidang Sumber Daya Manusia

Salah satu program yang sangat menentukan nasib suatu usaha ialah program meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun programnya yaitu sebagai berikut:

- a). Memberikan pelatihan yang diadakan setiap tahun. Pelaku usaha berpartisipasi dalam pelaksanaan ini seperti mengikuti program pelatihan.
- b). Adanya arahan atau bimbingan

Program Pemerintah dalam Bidang Desain dan Teknologi

Partisipasi pada program pemerintah melalui desain teknologi. Program ini berupa pemberian bantu-bantuan. Dengan adanya program ini lebih mendorong pelaku usaha kuliner untuk menjalankan usahanya. Adapun programnya yaitu:

- a). Adanya penataan tempat usaha
- b). Bantuan cat dan logo Kabupaten
- c). Bantuan tempat usaha

Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM Kuliner Sebagai (Fasilitator, Regulator dan Katalisator)

Sebuah kebijakan sebelum diimplementasikan pada sasaran kebijakan maka terlebih dahulu perlu adanya komunikasi terhadap implementor kebijakan. Peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator adalah suatu bentuk fungsi dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas, membuat kebijakan-kebijakan dan mediasi untuk pengembangan UMKM.

Tabel 7. Analisis Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator, Regulator dan Katalisator di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2019

No.	Interval Skor	Kategori	\sum Responden (orang)	Persentase (%)
1	1-5,3	Tinggi	0	0
2	5,4-9,7	Sedang	12	60
3	9,8-14,1	Rendah	8	40
Total			20	100
Rata-rata			9,8	

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2019

Bedasarkan Tabel 7 diatas, bahwa tingkat peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator terhadap pengembangan usaha mikro di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat untuk kategori sedang sebanyak 12 responden dengan persentase 60% dan kategori tinggi sebanyak 8 responden dengan persentase 40%, selanjutnya kategori kurang berperan tidak ada. Tingkat peran

pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator terhadap pengembangan UMKM rata-rata skor 9,8, sehingga tingkat peran pemerintah tergolong sedang.

Analisis Perkembangan UMKM Kuliner

Deskripsi hasil penelitian tentang perkembangan UMKM yang terjadi di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dari indikator modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja, dan cabang usaha UMKM.

Modal Usaha

Modal merupakan hal penting dalam suatu usaha, tanpa modal kegiatan usaha apapun tidak dapat berjalan. Tidak semua pelaku UMKM memiliki modal yang besar, banyak pelaku UMKM dengan modal terbatas. Oleh sebab itu untuk mengembangkan usahanya mereka mengajukan pembiayaan lembaga keuangan salah satunya bank dengan harapan usaha mereka dapat berkembang. Pelaku usaha di Kelurahan Mosso sebagian besar telah mendapatkan kemudahan dalam hal permodal karena dengan lembaga pemerintah telah menjembatani pelaku usaha kuliner untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank tanpa adanya jaminan sehingga memudahkan semua kalangan yang ingin memulai usaha untuk mendapatkan pinjaman modal.

Omzet Penjualan dan Keuntungan Usaha

Setelah mendapat pinjaman modal dari pihak bank memudahkan terbentuk usaha-usaha yang baru sehingga dalam hal omzet masih cenderung stabil atau tidak meningkat bahkan menurun. Hal tersebut berdampak pula pada keuntungan usaha yang cenderung stabil atau menurun. Sehingga problematika seperti ini yang membuat pengusaha kuliner di Kelurahan Mosso mengeluh.

Tenaga Kerja

Setelah mendapat pinjaman modal dari pihak bank memudahkan terbentuk usaha-usaha yang baru sehingga dapat membuka lapangan kerja baru. Tapi ketika penurunan omzet dan keuntungan penjualan karena persaingan, membuat pelaku usaha untuk memberhentikan sebagian tenaga kerja untuk menghindari kerugian usaha. Dengan penurunan jumlah tenaga kerja membuat pengangguran bertambah dan mendorong masyarakat untuk berfikir lebih inovatif lagi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Cabang Usaha

Semakin mudahnya dalam mendapatkan modal dari pinjaman bank mendorong hadirnya usaha-usaha yang baru sehingga adanya beberapa yang membuka cabang di tempat lain. Dengan terbentuknya usaha-usaha baru ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat

Kelurahan Mosso. Dari pertambahan jumlah usaha mikro kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2018-2019.

No.	Jenis Usaha	Tahun (Unit)		Persentase (%)	
		2018	2019	2018	2019
1	Warung Makan	37	45	72,55	65,22
2	Penjualan Es Kelapa	14	24	27,45	34,78
	Total	51	69	100	100
	Rata-Rata	25,5	34,5		

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2019

Dari Tabel 8 diatas, dapat dipaparkan bahwa jumlah usaha mikro warung makan pada tahun 2018 sebanyak 35 unit dengan persentase 72,55%, pada tahun 2019 sebanyak 45 dengan persentase 65,22%. Jenis usaha mikro kuliner penjualan es kelapa muda pada tahun 2018 sebanyak 14 dengan persentase 27,45%, pada tahun 2019 sebanyak 24 dengan persentase 34,78%. Total jumlah usaha mikro warung makan dan penjual es kelapa pada tahun 2018 sebanyak 51 unit dengan rata-rata 25,5 dan pada tahun 2019 sebanyak 69 unit dengan persentase 34,5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya pertambahan jumlah usaha mikro kuliner dari tahun 2018 ke 2019.

Analisis Hambatan dalam Pengembangan UMKM Kuliner

Hambatan Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam peranan pemerintah sebagai fasilitator terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tidak bertemunya fasilitas dan kebutuhan para pelaku UMKM permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Kurangnya komunikasi kebutuhan para pelaku UMKM bervariasi tergantung bidang usaha dan permasalahan yang dihadapi. Proses pengajuan kebutuhan membutuhkan proses validasi mengenai eksistensi dan kebutuhan UMKM. Komunikasi antara pelaku UMKM dan fasilitator yang kurang jelas menjadi penghambat. Salah satu contohnya adalah ketidakjelasan dalam pengajuan kebutuhan dari pelaku UMKM hal tersebut disampaikan kepala bagian Usaha Mikro Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Usaha Mikro di Kabupaten Majene.
- b). Perilaku pasif dalam proses pengembangan UMKM, informasi merupakan hal vital bagi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang masih kurang dalam mengakses informasi menjadi salah satu masalah yang menyebabkan sulitnya fasilitas yang diberikan pemerintah.
- c). Minim pemahaman informasi berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat diserap oleh para pelaku UMKM. Proses dalam

memperoleh bantuan fasilitas perlu dipahami oleh para pelaku UMKM. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena para pelaku UMKM berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, bidang usaha yang berbeda dan skala bisnis yang berbeda. Selain itu untuk proses validasi mengenai eksistensi dan aktivitas usaha yang dilakukan membutuhkan bukti berupa legalitas seperti izin P-IRT dari Dinas Kesehatan bagi bidang usaha kuliner, Halal label dari Majelis Ulama Indonesia dan BPOM bagi bidang usaha industri pengolahan bahan makanan mentah. Pemahaman akan syarat tersebut yang sebenarnya masih kurang dimengerti oleh para pelaku UMKM dalam proses pengajuan fasilitas.

Hambatan Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Kemudian peran pemerintah sebagai regulator dapat dikatakan ada apabila output yang dihasilkan dalam hal ini para pelaku usaha mikro dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan aturan yang ditetapkan. Pelaku usaha mikro kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tidak merasakan adanya kebijakan yang meningkatkan usaha mereka.

Hambatan Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Kemudian dari evaluasi program Pemerintah Kabupaten Majene sebagai Katalisator masih terdapat para pelaku usaha yang masih tidak paham akan pentingnya Business to Government yang sebenarnya akan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Selain itu permasalahan yang terjadi adalah timbulnya persepsi pesimisme di antara para pelaku usaha mikro yang merasa bahwa usaha mikro merupakan bidang usaha yang sulit untuk bertumbuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Program pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ada empat bidang yaitu dalam bidang produksi dan pengolahan, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia dan bidang desain teknologi.
- 2). Tingkat peran Pemerintah (Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan) sebagai fasilitator, regulator dan katalisator tergolong sedang.
- 3). Perkembangan usaha mikro kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ada empat bidang yaitu modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha, tenaga kerja, dan cabang usaha UMKM.

- 4). Ada beberapa hambatan dalam pengembangan usaha mikro kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yaitu kurangnya komunikasi, perilaku pasif, minimnya pemahaman informasi, kebijakan pemerintah yang kurang dan tidak pahamnya Business to Government.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan tingkat peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene berada pada kategori sedang, maka perlunya peran lebih aktif lagi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.
- 2). Dengan beberapa hambatan yang terjadi dalam pengembangan UMKM kiranya dapat diminimalisir sehingga pengembangan dapat berjalan lancar dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chol, J., & Shadily, H. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diva, G. 2009. *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- KBBI. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Muchdarsyah, S. 2003. *Produktivitas apa dan Bagaimana*: Jakarta: Bumi Aksara.
- Puspaningsih, A. 2004. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Reni, M. 2011. *Analisis Ekonomi pada Usaha Mikro Kuliner Wisata Belanja Tugu Kota Malang*. Malang: FE UM.
- Roestam, A. W. 2003. *Pelatihan Aplikasi Ergonomi untuk Produktivitas*.